

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)

Karmila^{1*}, Amries Rusli Tanjung², dan Edfan Darlis²

¹Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau

²Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Email :*milha_aniezz@yahoo.com*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini yaitu 40 SKPD pada provinsi Riau dan tiap SKPD diwakili oleh 3 orang yaitu Kepala Bagian Akuntansi/Keuangan dan dua orang staf pelaporan keuangan sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 33 pertanyaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya variabel pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada Provinsi Riau. Sedangkan variabel kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Riau.

Kata Kunci : *Pelaporan, SDM, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak tepat waktu. Keandalan dan *timeliness* informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta

dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Dari Hasil Riview Inspektorat Provinsi Riau Tahun 2012, bahwa sistem dan prosedur akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi Riau masih kurang memadai (Inspektorat Provinsi Riau), antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Riau belum menetapkan Kebijakan Akuntansi tentang Penetapan Umur (*Aging Schedule*) atas penyajian Piutang dan Investasi. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi Riau kesulitan menentukan berapa nilai Piutang yang kemungkinan tidak tertagih atau nilai Investasi Non Permanen yang kemungkinan tidak tertagih.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012 tidak dihasilkan dari suatu proses Akuntansi Daerah yang harus di selenggarakan oleh entitas akuntansi, yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. a13 Tahun 2006 pasal 232) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran II, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tanggal 5 April 2007 tentang Tata Usaha Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau.

Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah Hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Riau (*Sumber: BPK RI, www.bpkriau.go.id*). yaitu :

1. BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya adalah (1) Realisasi belanja hibah, bantuan sosial dan belanja modal Pemerintah Provinsi Riau TA 2012 menyalahi ketentuan penganggaran; (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah tidak dikelola dengan baik dan tidak menguntungkan pemerintah Provinsi Riau; (3) Tata cara pembayaran transfer bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/ Kota tidak jelas dan tarif pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau bertentangan dengan Peraturan Daerah; (4) Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan (PMEK) tidak dikelola dan dimonitor secara memadai; (5) Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diyakini kewajarannya dan belum dilakukan penilaian atas nilai tanah pada 99 ruas jalan.
2. Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Pengelolaan Kas Daerah belum tertib dan tidak sesuai ketentuan; (2) Sisa Uang Persediaan TA 2012 terlambat disetor ke Kas Daerah dan pemulihan kekurangan kas TA 2007, 2008 dan

2010 ditindaklanjuti dengan SKTJM Tahun 2013; (3) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Penyertaan Modal dan bukti kepemilikan modal tidak dalam penguasaan Kuasa BUD; (4) Pemberian wilayah izin usaha pNahartyoan melebihi ketentuan, penerbitan IUP eksplorasi tidak didahului dengan penempatan jaminan pelaksanaan dan pemegang IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi belum menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang; (5) Pembayaran biaya pemungutan pajak daerah tidak sesuai ketentuan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hasil review Inspektorat Provinsi Riau dan hasil audit BPK RI tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah provinsi Riau masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan. Padahal keterandalan merupakan unsur yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Basis akuntansi yang diterapkan pun mengalami perubahan dari basis kas (*cash basis*) ke basis akrual (*accrual basis*). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Oleh karena itu diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi.

Kapasitas sumber daya manusia yang memadai, namun jika tidak didukung dengan teknologi informasi belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal. Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh human eror. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Hal ini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut, dan kendala lainnya adalah keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi.

Kendala-kendala ini menjadi belum optimalnya faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin akan berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software*, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk dapat menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal. Masalah-masalah yang ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dan

temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang kelemahan sistem pengendalian intern tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pengendalian intern ini menjadi sangat penting karena sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja mau pun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk menyakinkan para *stakeholder* maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dibutuhkan sistem pengendalian intern yang optimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demikepentingan masyarakat dan daerah.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

TELAAH PUSTAKA

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi APBN/D, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah.

Keterandalan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Kapasitas Sumberdaya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Menurut Tjiptoherijanto (2001, dikutip oleh Indriasari dan Nahartyo, 2008), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern adalah: “Pengendalian internal adalah suatu proses, dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Kepatuhan dengan hukum yang berlaku dan peraturan”

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP. 60 tahun 2008 yang dibuat berdasarkan adopsi dari COSO tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa unsur-unsur pembentuk SPIP antara lain:

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Kerangka Pemikiran, Model , dan Hipotesis Penelitian

1. Hubungan kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut penulis menduga bahwa terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka hipotesis yang penulis ajukan:

H1 : Sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Hubungan kapasitas pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan tidak berjalannya pengendalian intern, banyak terjadi penyimpangan dan kebocoran yang ditemukan di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yaitu keterandalan.

Masalah-masalah yang ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan dan temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan

sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang kelemahan sistem pengendalian intern tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H₃ : Pengendalian Intern berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini kepala bagian akuntansi/keuangan dan staf bagian akuntansi/keuangan yang berjumlah 120 responden. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Responden Penelitian

No	Nama SKPD	Kode
1	Dinas Pendidikan	3
2	Bapersip dan Dokumentasi	3
3	Dinas Kesehatan	3
4	Rumah Sakit Umum Daerah	3
5	Rumah Sakit Jiwa	3
6	Rumah Sakit Petala Bumi	3
7	Dinas Pekerjaan Umum	3
9	BAPPEDA	3
10	Dinas Perhubungan	3
11	Badan Lingkungan Hidup	3
12	Dinas Sosial	3
13	Disnaker, Transmigrasi dan Kependudukan	3
14	Dinas Koperasi dan UKM	3
15	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	3
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	3
18	Satpol PP	3
19	Sekretaris DPRD	3
20	Sekretaris Daerah	3
21	Badan Penelitian dan Pengembangan	3
22	Inspektorat Provinsi Riau	3
23	Badan Penghubung Provinsi Riau	3
24	Dinas Pendapatan	3
25	Badan Kepegawaian Daerah	3
26	BPPM	3
27	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	3
28	Dinas Tanaman Pangan	3
29	Dinas Perkebunan	3

30	Dinas Peternakan	3
31	Badan Ketahanan Pangan	3
32	Dians Kehutanan	3
33	Dinas P Nahartyoan Energi	3
34	Dinas Perikanan dan Kelautan	3
35	Dinas perindustrian dan Perdagangan	3
36	Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3
37	Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan	3
38	Dinas Komunikasi, Informatika, dan PDE	3
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
40	Sekretariat KORPRI	3
Jumlah		120

Sumber: Biro keuangan Provinsi Riau

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden di bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau. Selain kuesioner, peneliti akan melakukan metode wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan data yang menunjang penelitian.

Variabel dan Pengukuran

Pada penelitian ini terdapat dua variable yaitu variable independen dan variable dependen. Sebagai variable independen adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi. Untuk variable dependen adalah keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hipotesis yang diuji, maka variabel penelitian disajikan sebagai berikut:

1. Variabel dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik.

Variabel ini diukur dengan menggunakan 7 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008). Pertanyaan pertanyaan tersebut sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan penyajian setiap fakta informasi dalam laporan keuangan secara jujur, penyajian informasi dalam laporan keuangan yang dapat diverifikasi, serta penyajian

informasi dalam laporan keuangan yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju. Jawaban item pertanyaan tersebut memiliki nilai kisaran 7-35.

2. Variabel independen

a. Kapasitas sumber daya manusia

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Variabel ini diukur dengan menggunakan 10 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju. Jawaban item pertanyaan tersebut memiliki nilai kisaran 10-50.b.

b. Pemanfaatan teknologi informasi

Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi.

Variabel ini diukur dengan menggunakan 8 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju. Jawaban item pertanyaan tersebut memiliki nilai kisaran 8-40.

c. Pengendalian intern akuntansi

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Variabel ini diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008). Variabel ini diukur dengan

menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju. Jawaban item pertanyaan tersebut memiliki nilai kisaran 9-45.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 120 untuk bagian akuntansi/tata usaha keuangan SKPD di provinsi Riau. Kuesioner didistribusikan untuk kepala dan staf bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Dari seluruh kuesioner yang telah disebar diperoleh 69 kuesioner yang kembali (57,50%). Statistik deskriptif tiap variabel dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Deviasi Standar
Keterandalan	20	45	36.12	5.351
Kapasitas Sumber Daya Manusia	13	31	23.20	3.818
Pemanfaatan Teknologi Informasi	15	27	22.26	2.682
Pengendalian Intern Akuntansi	20	30	24.22	2.412

Sumber: diolah dari hasil penelitian

Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan masing-masing variabel, dinyatakan terdapat 5 butir pertanyaan dari 37 butir pertanyaan harus dikeluarkan (*drop*), yaitu satu pertanyaan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (butir 4), tiga pertanyaan pada variabel pengendalian intern akuntansi (butir 1,2,3), dan satu pertanyaan pada variabel keterandalan pelaporan keuangan (butir 1). Hal ini karena ketiga butir pertanyaan tersebut tidak valid dengan nilai *correlations* di bawah 0,30.

Sedangkan hasil uji reliabilitas membuktikan bahwa besaran *Conbrach's Alpha* untuk masing-masing variabel pengukur di atas 0,60. Hasil ini berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yaitu seperti yang terlihat dari hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam Tabel 3:

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Keterandalan	10	0.785	Reliabel
Kapasitas Sumber Daya Manusia	7	0.770	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	8	0.630	Reliabel
Pengendalian Intern Akuntansi	6	0.612	Reliabel

Sumber: diolah dari hasil penelitian

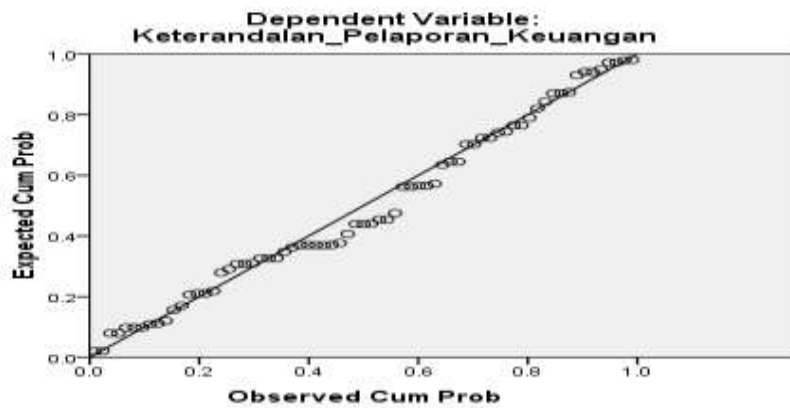
Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati plot grafis distribusi normal dan uji statistik dari distribusi residual. Pengujian

normalitas data dengan mengamati plot grafis distribusi normal dengan melihat grafik *normal probability-plot of regression standardized residual*. Pada normalitas data dengan Normal P-P Plot (Gambar.1), data pada variable yang digunakan dinyatakan terdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu variable dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Sedangkan hasil uji statistik yang dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov mengindikasikan bahwa distribusi residual adalah normal karena nilai Kolmogorov-Smirnov tidak signifikan ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam regresi terpenuhi. Hasil uji normalitas data disajikan dalam Tabel 4.

Gambar 1. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kapasitas_Su mberdaya_Ma nusia	Pemanfaatan_ Teknologi_Inf ormasi	Pengendalia n_Intern	Keterandalan_Pelap oran_Keuangan
Normal Parameters ^a , b	Mean	36.12	23.20	22.26	24.22
	Std. Deviation	5.351	3.818	2.682	2.412
Most Extreme Differences	Absolute	.134	.114	.142	.159
	Positive	.101	.102	.118	.159
	Negative	-.134	-.114	-.142	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		1.113	.945	1.183	1.322
Asymp. Sig. (2-tailed)		.168	.333	.122	.061

Sumber: diolah dari hasil penelitian

Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dibuktikan dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Hasil pengujian menyatakan bahwa nilai VIF dan *tolerance* pada masing-masing variabel independen menunjukkan angka lebih

kecil dari 10 dan lebih besar dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi linear penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kapasitas_Sdm	.648	1.543	Bebas Multikolinieritas
Pemanfaatan_Sdm	.517	1.936	Bebas Multikolinieritas
Pengendalian_Intern	.574	1.742	Bebas Multikolinieritas

Sumber: diolah dari hasil penelitian

Autokorelasi

Autokorelasi diasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain. Gejala autokorelasi dapat dideteksi dengan nilai *Durbin Watson*. Hasil pengujian menunjukkan tidak ada autokorelasi karena nilai *Durbin Watson* berada antara -2 sampai dengan +2. Hasil uji autokorelasi disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Autokorelasi

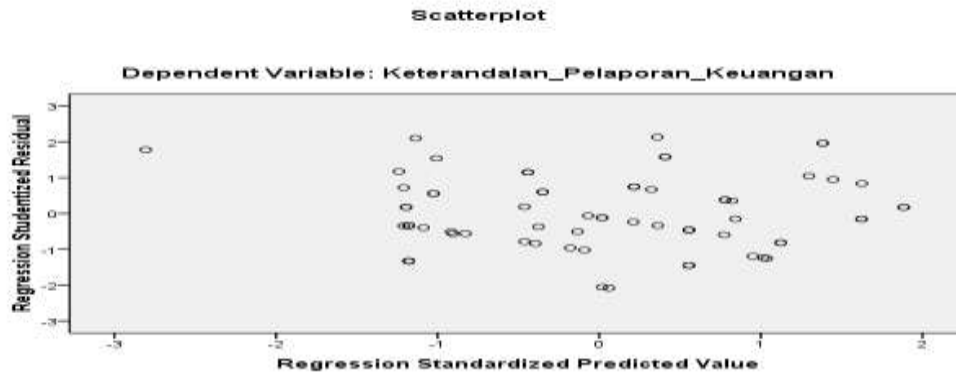
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.536 ^a	.288	.255	2,082	1,447

Sumber: diolah dari hasil penelitian

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan variansi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik penyebaran residual dan pengujian statistik menggunakan uji *Glejser* (Gujarati, 2003, dikutip oleh Indriasari dan Nahrtyo, 2008). Hasil pengamatan grafik menyatakan bahwa pola penyebaran residual terhadap nilai prediksi Y yang menyebar di sekitar garis horizontal (*standard error of estimate*, $se=0$) tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linear penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas disajikan Gambar 2.

Gambar 2. Heteroskedastisitas



Pengujian Hipotesis

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian secara individual mampu menjelaskan variabel dependen yang dilakukan dengan regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Hipotesis H_1 , H_2 , dan H_3 akan diuji dengan *partial correlation*. Pengujian signifikansi dilakukan melalui *t-test*. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi

Variable	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.882	2.246		6.180	.000
Kapasitas_Sumber daya manusia	.055	.059	.123	.944	.349
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.197	.092	.311	2.138	.036
Pengendalian Intern	.170	.124	.188	1.364	.177

Sumber: diolah dari hasil penelitian

1. Pengujian Hipotesis 1 (H_1)

Hasil pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari tabel IV.5 dapat dilihat besar t_{hitung} untuk pengujian hipotesis ini adalah sebesar 0.944. Nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,994 > 0.944. Dan dari kolom Sig. (signifikansi) diperoleh nilai 0,349 yang berarti lebih kecil dari derajat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan kata lain H_1 **ditolak**. Ketidaksignifikanan ini disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang belum mendukung. Meskipun pemerintah provinsi Riau telah memperbantukan lebih kurang tujuh puluh tenaga akuntansi yang tersebar di satker-satker, namun belum optimal.

Karena dengan banyaknya volume transaksi keuangan pemerintah provinsi Riau, maka idealnya tenaga akuntansi itu lebih kurang lima orang pada setiap satker.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008). Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya *job description*, walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keandalan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah.

2. Pengujian Hipotesis 2 (H₂)

Hasil pengujian hipotesis H₂ menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah provinsi. Dari tabel IV.5 dapat dilihat besar t_{hitung} untuk pengujian hipotesis ini adalah sebesar 2.138. Nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,994 < 2.138. Dan dari kolom Sig. (signifikansi) diperoleh nilai 0,036 yang berarti lebih kecil dari derajat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan kata lain H₂ diterima. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.

Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi pada pemda provinsi Riau dapat memberikan peningkatan keandalan pelaporan keuangan yang harus dipenuhi.

3. Pengujian Hipotesis 3 (H₃)

Hasil pengujian hipotesis H₃ menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari tabel IV.5 dapat dilihat besar t_{hitung} untuk pengujian hipotesis ini adalah sebesar 1.364. Nilai t_{tabel} adalah sebesar 1,994 > 1.364. Dan dari kolom Sig. (signifikansi) diperoleh nilai 0,177 yang berarti lebih kecil dari derajat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap

keterandalan pelaporan keuangan. Dengan kata lain H_3 ditolak. Ketidaksignifikanan ini disebabkan lemahnya pengendalian intern pemerintah daerah provinsi Riau. Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan masih lemahnya pengendalian intern pemda provinsi Riau.

Temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Dalam penelitiannya mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan survei terhadap kepala dan staf bagian akuntansi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengendalian intern akuntansi telah memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pelaporan keuangan pemerintah yang tercermin dari keandalan nilai informasi laporan keuangan. Ketidakkonsistenan ini bisa saja disebabkan oleh perbedaan kondisi dan situasi dari masing-masing pemerintah daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari nilai t_{test} dan probabilitasnya, hipotesis H_1 yang diajukan tidak terdukung karena $t_{test} 0.944$ dan probabilitas $0.349 > \alpha 0.05$.
2. Dilihat dari nilai t_{test} dan probabilitasnya, hipotesis H_{2a} yang diajukan terdukung dengan $t_{test} 2.138$ dan probabilitas $0.036 < \alpha 0.05$.
3. Dilihat dari nilai t_{test} dan probabilitasnya, hipotesis H_{1c} yang diajukan tidak terdukung dengan $t_{test} 1.364$ dan probabilitas $0.177 > \alpha 0.05$.

Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya antara lain :

1. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di beberapa kabupaten bahkan se Provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Peneliti selanjutnya dapat lebih maksimal dalam memperoleh data kuisisioner dan wawancara. Misalnya mencari waktu yang tepat bagi responden untuk mengisi kuisisioner dengan sistem wawancara, memberikan pemahaman kepada responden yang kurang paham terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan. Sehingga, pengisian kuisisioner lebih jelas dan akurat.

3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang memungkinkan dalam mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (pemda).

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol 5 No.1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 69-80.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2006), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK RI di Jakarta.
- Winidyaningrum, Celviana Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2004. BPFE, Yogyakarta
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). 1999. Concepts Statement No.1: Objectives Of Financial Reporting In Governmental Accounting Standards Board Series Statement No. 34: Basic Financial Statement And Management Discussion and Analysis For State and Local Government. Norwalk.
- Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo. 2008. "Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)". Pontianak : Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Mustafa, Santiadji, Sutrisno, Rosidi, 2010. "Analisis Faktor –Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Skpd Pemerintah Daerah Kota Kendari", Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1 Vol. 13, Juni 2010, hal 73-84
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Warisno. 2009. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Widjayanto, Nugroho. 2011. Sistem Pengawasan manajemen. Andi Offset, Jakarta.
- Zetra, Aidinil. 2009. Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi.